



Peningkatan Kesadaran Politik Pada Generasi Muda di Kabupaten Maros

Lukman Irwan*¹, Abd. Rasyid J², Ilham Jaya³

¹Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

²Departemen Kelautan, Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan, Universitas Hasanuddin

³Departemen Perikanan, Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan, Universitas Hasanuddin

*e-mail corespondensi: lukman97.polpem@gmail.com

Abstrak

Kegiatan ini telah dilaksanakan di Kabupaten Maros bekerja sama dengan BAWASLU Kabupaten Maros, dalam bentuk Diskusi, Ceramah, dan pendampingan terkait dengan Bimbingan Peningkatan Kesadaran Politik Pada Generasi Muda di Kabupaten Maros dengan materi yang disampaikan yaitu: Demokrasi, *Sistem Pemilihan di Indonesia*, Money Politic, Generasi Milenial, Partisipasi Generasi Milenial (Muda) dalam Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik Bagi Generasi Milenial (Muda). Hasil dari Pengabdian yang telah dilaksanakan (1) Pengabdian ini dapat merubah pola pikir dan menambah pengetahuan bagi generasi muda berkaitan dengan tingkat partisipasi politik bagi Generasi Muda meningkat dan berkurangnya keterlibatan money Politic, (2) Merumuskan Kabupaten Maros sebagai daerah percontohan dalam partisipasi politik yang tinggi bagi generasi muda, (3) Mendukung pelaksanaan tugas bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Maros.

Kata kunci: *Partisipasi Pemilu, Generasi Muda, Kabupaten Maros*

Abstract

This activity has been carried out in Maros Regency in collaboration with the Maros Regency BAWASLU, in the form of discussions, lectures, and assistance related to Guidance on Increasing Political Awareness of the Young Generation in Maros Regency with the material presented, namely: Democracy, Election System in Indonesia, Money Politics, Millennial Generation, Millennial Generation Participation (Young) in General Elections and Political Education for Millennial Generation (Young). The results of the services that have been carried out (1) This service can change the mindset and increase knowledge for the younger generation related to the level of political participation for the Young Generation increasing and reducing the involvement of money politics, (2) Formulating Maros Regency as a pilot area in high political participation for the younger generation, (3) Supporting the implementation of tasks for the General Election Supervisory Body (BAWASLU) of Maros Regency

Keywords: Election Participation, Young Generation, Maros Regency



1. Pendahuluan

Di Negara Demokrasi partisipasi politik warga negara berangkat dari pemahaman bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat. Karena itu dalam implementasinya segala pengambilan keputusan politik harus melibatkan peran serta rakyat di dalamnya. Hal tersebut bertujuan agar setiap kebijakan politik yang nanti dihasilkan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi. Karena itu segala praktek penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasarkan pada kehendak rakyat. Secara eksplisit landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara secara demokratis tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang telah dimandemen. Dalam pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa “Kedaulatan Negara berada Ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, segala pengambilan keputusan politik haruslah bersumber pada kehendak rakyat.

Sebagai wujud real pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat ialah dengan melibatkan atau mengikutsertakan warga negara Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan politik.

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia terdapat beberapa ketentuan yang menjadi Landasan yuridis pengakuan negara bagi pelaksanaan partisipasi politik warga negara. Dalam UUD 1945 hasil amandemen jaminan terhadap pelaksanaan partisipasi politik warga negara termuat pada pasal 22 e tentang pelaksanaan pemilihan Umum, pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, pasal 28 d tentang kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan serta pasal-pasal lainnya. Selain itu terdapat juga ketentuan undang undang mengenai jaminan pelaksanaan partisipasi politik seperti termuat dalam UU No.12 Tahun 2005 tentang jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan, UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,

Akan tetapi menjadi persoalan saat ini di era pasca reformasi keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampilkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya. Di beberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golput (golongan putih) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang ditawarkan. Selain itu, pelaksanaan partisipasi politik yang sehat masih terancam akan bahaya laten



seperti penggunaan politik uang (money politics) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Begitu pula, adanya dugaan permasalahan terkait proses mobilisasi massa didaerah-daerah terpencil yang masih terkendala akses informasi maupun netralitas proses pengawasan.

Jiwa muda adalah jiwa yang penuh semangat, jiwa yang memiliki amunisi moodboster. Hal tersebut sejalan dengan yang apa yang disampaikan oleh Syamsuddin (2008:9), bahwa ciri khas dari seorang pemuda adalah semangatnya yang menyala-nyala. Seorang pemuda secara fisik memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan usia di atasnya. Oleh karena itu, pemuda termasuk ke dalam usia yang produktif.

Berbagai bidang yang mampu pemuda jadikan sebagai upaya dalam pembangunan bangsa termasuk bidang politik. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik. Demokrasi menjadi sesuatu yang bersifat substansial dalam sebuah negara. Salah satu indikator kualitas demokrasi suatu negara diantaranya dapat dilihat dari tinggi serta rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat termasuk kaum muda. Kharisma (2014) menyebut partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Keterlibatan pemuda dalam panggung politik adalah sebuah upaya dalam memperjuangkan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan dan semangat pemuda dianggap mampu untuk memecahkan segala persoalan bangsa.

Berbicara pemuda dan politik, bukanlah sesuatu hal yang baru diperbincangkan. Sejarah mencatat ragam peran pemuda dalam politik kebangsaan Indonesia. Jurdi (2012:30) menegaskan bahwa dalam sejarah panjang negara, peran pemuda dalam perpolitikan Indonesia telah mengalami dialektika dengan berbagai konteks sosiokultural yang dihadapinya, jauh sebelum Indonesia merdeka, pemuda telah memperlihatkan partisipasi politik yang tinggi sebagai manifestasi dari keinginan untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme barat.

Secara umum pandangan anak muda ini terhadap politik itu menggambarkan sesuatu hal negatif yang di dalam nya itu hanya lah tentang perebutan jabatan/kekuasaan yang hanya memikirkan keuntungan pribadi di bandingkan mengedepankan kepentingan untuk kebaikan orang banyak. Hal yang menyebabkan mengapa generasi milenial itu cenderung menutup mata dan telinga mereka terhadap politik dikarenakan dari image politik yang disuguhkan kepada mereka itu sangat tidak baik. Politik itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan (fun) bagi generasi milenial karena politik yang sering mereka konsumsi itu adalah politik kegaduhan saling menjatuhkan satu sama lain yang menjadi lawan politiknya dan membawa kesan hectic bagi generasi milenial, sehingga pemahaman politik yang hadir dalam diri generasi milenial itu akan salah kaprah.



Menurut Yanuar (2017:55) “Kesadaran politik warga masyarakat menjadi faktor kunci dalam partisipasi politik masyarakat, tanpa kesadaran berpolitik tentu tidak terwujud partisipasi politik yang aktif sehingga terwujud kehidupan demokrasi yang baik di daerah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya”. Dengan demikian, ada sebuah pertanyaan besar yaitu bagaimana membentuk kesadaran politik generasi millennial melalui pendidikan politik sehingga dapat berdampak bagi kualitas partisipasi politik mereka dalam kehidupan berdemokrasi ?

Morissan (2016) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial Generasi Muda Pengguna Media Sosial” menunjukkan sebanyak 73,2 persen responden memberikan suara pada Pemilu legislatif 2014 dan sebagian besar (80%) menunjukkan keinginan besar untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden 2014. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik di kalangan pemilih pemula adalah tinggi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah apabila partisipasi politik tidak diimbangi dengan literasi politik melalui pendidikan politik, maka partisipasi politik itu bisa menjadi partisipasi politik yang semu tak bermakna.

Pendidikan politik menjadi hal yang amat penting bagi seluruh warga negara khususnya generasi milenial dalam rangka transfer pengetahuan politik dan penanaman nilai-nilai pengetahuan politik agar menjadi warga negara yang baik (Tarsidi, 2018). Pengetahuan dan pemahaman politik ini sangat penting bagi generasi milenial untuk mengetahui hak-hak dan kewajibannya dalam upaya berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik secara umum merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap seseorang agar dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik tidak hanya berupa proses dalam rangka menambah pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana seseorang melalui pendidikan politik dapat bertindak secara akal pikiran. Seperti yang dikemukakan oleh Alfian (1983:235) yang mengatakan bahwa “Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun”.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi tentang Peningkatan Kesadaran Politik pada generasi muda. Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif akomodatif untuk meningkatkan partisipasi politik bagi generasi muda, maka tim akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan “**Peningkatan Kesadaran**



Politik pada generasi muda di Kabupaten Maros”. adapun susunan acara dan Materi pelatihan tersebut, meliputi:

I. Pembukaan

Pembukaan secara resmi kegiatan oleh perwakilan Pemerintah dan BAWASLU Kabupaten Maros.

II. Susunan Materi Diskusi

Hari Pertama : (3 orang pemateri dan 1 orang moderator)

Materi Pertama : Demokrasi

Materi Kedua : Sistem Pemilihan di Indonesia

Materi Ketiga : Bahaya Money Politic

Hari Kedua : (3 orang pemateri dan 1 orang moderator)

Materi Keempat : Generasi Milenial

Materi Kelima : Partisipasi Generasi Milenial (Muda) dalam Pemilihan Umum

Materi Keenam : Pendidikan Politik Bagi Generasi Milenial (Muda)

3. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah, diskusi tentang Peningkatan Kesadaran Politik pada generasi muda di Kabupaten Maros telah dilakukan secara bertahap dimulai pada tanggal 10 Mei sampai dengan 11 Mei 2021.

Tahapan pertama: Tanggal 26 Februari sampai dengan 2 Maret 2021 dilakukan komunikasi awal dan pemantapan kegiatan melalui kesepakatan dengan pemerintah dan BAWASLU Kabupaten Maros terkait dengan jadwal pelaksanaan Kegiatan. Tahap kedua: pelaksanaan Seminar dan FGD tentang Peningkatan Kesadaran Politik pada generasi muda di Kabupaten Maros selama dua hari sejak tanggal 10-11 Mei 2021 di Aula Kantor BAWASLU dengan peserta dari Unsur pemuda dan staff BAWASLU Kabupaten Maros. adapun susunan acara dan Materi pelatihan tersebut, meliputi:

a. Hari Senin/Tanggal 10 Mei 2021 (Hari Pertama):

Kegiatan ini di isi oleh 3 (tiga) orang pemateri dan 1 (satu) orang moderator

Materi Pertama : Demokrasi

Materi Kedua : Sistem Pemilihan di Indonesia

Materi Ketiga : Bahaya Money Politic

b. Hari Selasa/Tanggal 11 Mei 2021 (Hari Kedua):

Kegiatan ini di isi oleh 3 (tiga) orang pemateri dan 1 (satu) orang moderator

Materi Keempat : Generasi Milenial



Materi Kelima : Partisipasi Generasi Milineal (Muda) dalam Pemilihan Umum

Materi Keenam : Pendidikan Politik Bagi Generasi Milineal (Muda)

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua BAWASLU Kabupaten Maros Bapak Sufirman, S.IP pada tanggal 10 Mei 2021 dan ditutup pada tanggal 11 Mei 2021. Selama 2 (Hari) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah, diskusi tentang Peningkatan Kesadaran Politik pada generasi muda di Kabupaten Maros yang diikuti oleh Generasi Milineal (Pemuda) serta staf BAWASLU Kabupaten Maros hasil yang diperoleh dari peserta antara lain:

- a. Generasi Milineal (Pemuda) akan sadar begitu pentingnya suara mereka dalam pemilihan baik pemilihan legislatif maupun eksekutif
- b. Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan generasi milenial (pemuda) mampu membawa perubahan dalam hal ini ikut serta dalam pemilu (Demokrasi) dan mengurangi Money Politik maupun Golput.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ceramah, diskusi tentang Peningkatan Kesadaran Politik pada generasi muda di Kabupaten Maros sesuai dengan jadwal Berikut ini:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian di Kabupaten Maro

Hari/Jam	Acara/Materi	Pemateri	Moderator
SENIN 10-05-2021			
09.00-10.00	Registrasi Peserta	Panitia	
10.00-10.15	Laporan Kegiatan Pelatihan	Dr. A. Lukman Irwan.,S.IP.,M.Si	Panitia
10.15-10.30	Sambutan dan Pembukaan Kegiatan Pelatihan	Sufirman, S.IP. (Ketua Bawaslu Kabupaten Maros)	Panitia
10.30-12.30	Demokrasi	Dr. A. Lukman Irwan.,S.IP.,M.Si	Saharuddin.,S.IP, M.Si
12.30-14.00	ISHOMA	Panitia	Panitia
14.00-15.30	Sistem Pemilihan Di Indonesia	Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.	Saharuddin.,S.IP, M.Si
15.30-16.00	Istirahat	Panitia	Panitia
16.00-17.30	Bahaya Money Politic	Dr. Ir. Abd Rasyid J. M. Si	Saharuddin.,S.IP, M.Si
SELASA 11-05-2021			
09.30-10.30	Generasi Milenial	Ir. Ilham Jaya, MM	Saharuddin.,S.IP, M.Si
10.30-11.45	Partisipasi Generasi Milineal (Muda) dalam Pemilihan Umum.	Dr. A. Lukman Irwan.,S.IP., M.Si,	Saharuddin.,S.IP, M.Si



11.45-14.00	ISOMA	Panitia	Panitia
14.00-15.00	<i>Pendidikan Politik Bagi Generasi Milineal (Muda)</i>	Dr. Rahmat Muhammad, M.Si.	Saharuddin.,S.IP, M.Si
15.00-15.30	Penutupan	1. Dr. A. Lukman Irwan.,S.IP., M.Si, 2. Sufirman, S.IP.	Panitia

Adapun Deskripsi singkat dari masing-masing materi dapat diuraikan sebagai berikut:

Materi Pertama: Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

Di dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Hornby,dkk,; 261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan democracy adalah: “(1) country with principles of government in which all adult citizen share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities; (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals”.

Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa demokrasi merujuk pada konsep kehidupan Negara atau masyarakat tempat warga Negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Lalu, pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, serta menegakkan rule of law. Selain itu, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling member peluang yang sama.

Istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani Kuno, khususnya dikota Athena, untuk menunjukkan system pemerintahan yang berlaku disana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan eh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat tersebut. Diambil keputusan bersama mengenai garis- garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan kemasyarakatan.

Karena rakyat ikut berpartisipasi secara langsung, pemerintahan itu disebutkan pemerintahan demokrasi langsung. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat dilihat di dalam pemerintahan desa itu dilakukan secara sederhana sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperti



padi atau pisang. Rakyat memberikan suara kepada calon masing-masing yang dipilih dengan memasukkan lidi ke dalam tabung bambu milik calon yang dipihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyaklah yang terpilih menjadi kepala desa. Di samping memilih kepala desa, pada hari-hari tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa dibalai desa untuk membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam ini dikenal dengan nama musyawarah desa.

Dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan penduduknya pun terus bertambah sehingga demokrasi langsung tidak lagi diterapkan karena;

- a. Tempat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar tidak mungkin disediakan.
- b. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang besar tidak mungkin dilaksanakan.
- c. Hasil persetujuan secara bulat atau mufakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya memungut suara dari semua peserta yang hadir.

Bagi Negara-negara besar yang berpendudukannya berjuta-juta, yang tempat tinggalnya bertebaran di beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung juga mengalami kesukaran. Untuk memudahkan pelaksanaannya, setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang menjalankan demokrasi. Rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Bagi Negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena hal-hal berikut.

- a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilakukan.
- b. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin ruit dan tidak sederhana lagi, berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa yang tradisional.
- c. Setiap warga Negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam aktivitas kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian dibidang pemerintahan negara.

Istilah demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu sesudah zaman Yunani Kuno tidak disebut lagi. Baru setelah meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, istilah demokrasi muncul kembali sebagai lawan system pemerintahan yang absolute (monarki mutlak), yang menguasai pemerintahan di dunia Barat sebelumnya.



Di dalam kenyataannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti luas sebagai berikut.

- a. Mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memiliki dan dipilih untuk badan-badan perwakilan.
- b. Kemudian digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

Dengan demikian, demokrasi dalam arti luas, selain mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokrasi ekonomi dan sosial. Namun, pengertian demokrasi yang paling banyak dari dahulu sampai sekarang ialah demokrasi pemerintahan.

Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah yang pengakuan hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan antara yang satu dan yang lain. Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut.

- a. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia.
- b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995:6) mengintisarkan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar atau soko guru, yakni “kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang dipilih, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan Hak Asasi Manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, serta kerja sama dan mufakat.”

Keunggulan Demokrasi

Sebagaimana telah diuraikan, ciri-ciri demokrasi antara lain:

- a. Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat
- b. Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan
- c. Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat; serta
- d. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara



Materi Kedua: Sistem Pemilu (Pemilihan) di Indonesia

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum. Dalam kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial”, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.

Berdasarkan uraian di atas, Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Secara sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system Pemilihan Umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

1. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut system Distrik)
2. Multy-member Constituency (satu daerah memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan system perwakilan berimbang atau system proporsional).

a. Sistem Distrik

Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suara- suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecilnya selisih kekalahannya.

b. Keuntungan Sistem Distrik

Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui *stembus accord*.



1. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
2. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya.
3. Bagi partai besar system ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, sedikit banyak partai pemenang dapat mengendalikan parlemen.
4. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional.
5. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

- Kelemahan Sistem Distrik

System ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpecah dalam berbagai distrik. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan.

Sistem distrik dan dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

- Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem proporsional

Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi social politik (orsospol). Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambing suatu orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing-masing orsospol, ditentukan melalui pejumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (provinsi). Masing-masing daerah diberi jatah



kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan.

Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih adalah ditentukan oleh jumlah suara yang diraih masing-masing parpol atau orsospol peserta pemilihan umum. Calon terpilih untuk menjadi wakil rakyat ditentukan berdasarkan nomor urut calon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing-masing daerah. Inilah yang disebut perhitungan suara secara proporsional, bukan menurut distrik pemilihan (yang pada setiap distrik hanya akan ada satu calon yang terpilih).

- Keuntungan sistem proporsional
 - a. Dianggap lebih representative karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi.
 - b. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Karena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada system ini
- Kelemahan
 - a. Kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi diantara berbagai golongan di masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmenrasi dan berdirinya partai baru yang pluralis.
 - b. Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya, system ini member kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui Stelsel daftar (List System).
 - c. Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam system pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi

Materi Ketiga: Bahaya Money Politic

Fenomena yang selalu mengemuka, tak terkecuali di tahun politik adalah hadirnya politik uang sebagai bagian pelaksanaan pesta demokrasi. James Pollock (1920) menyatakan, relasi antara uang dan politik akan terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan pemerintahan Hal ini karena memang uang merupakan alat



yang sangat signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya. Maka sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, dapat dipindahkan dan dipertukarkan tanpa meninggalkan jejak sumbernya.

Politik uang merupakan salah satu musuh utama dalam setiap penyelenggara pesta demokrasi, baik nasional maupun lokal di Indonesia. Politik uang dimaksudkan sebagai praktek pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu, maupun oleh tim sukses, baik yang resmi maupun tidak, biasanya sebelum pemungutan suara dilakukan.

Politik Uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik.

Politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Politik uang dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum.

Dari pengertian tentang politik uang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dijabarkan bahwa politik uang adalah semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, modus yang ada biasanya dengan memberi, menjanjikan uang atau materi lainnya, kepada seseorang agar seseorang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu, atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Politik uang dengan demikian adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang.

Bertitik dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa politik uang yang biasanya terjadi yaitu merupakan pemberian ataupun barang, dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih, dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.



Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta demokrasi pun ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena didalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disuguhi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat pemilu maupun partainya sendiri. Salah satu kecurangan pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang melakukan politik uang tersebut.

Ada dua subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang, yaitu peserta pemilu (CANDIDAT) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para kandidat melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan kandidat lain. Kandidat yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang. Para kandidat yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulang hal yang sama.

Alasan lainnya adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para kandidat pemimpin. Hal tersebut memberikan efek negatif bagi para elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata.

Begitupun sebaliknya adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa “berhutang budi” pada kandidat yang memberikan uang tersebut. Biasanya peserta pemilu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akan membuat program-program yang didalamnya terindikasi politik uang.

Politik uang sangat sulit diberantas, hal ini dapat di sebabkan pada kenyataan bahwa adanya saling keterkaitan antara kemiskinan dan praktik politik uang. Jadi selama kemiskinan belum berhasil teratasi maka politik uang akan terus berlanjut. Sebagai dasar pemikirannya adalah uraian berikut ini, dalam penelitian terakhir BPS pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26.95 juta oran (9,82 persen).

Karena kebutuhan primer menuntut untuk segera terpenuhi guna berkelanjutan hidupnya. Dimana kebutuhan primer selalu berkisar diantara tiga hal, yaitu menyangkut sandang, pangan dan papan. Jika ketiga kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi, maka kebutuhan sekunder akan menjadi tujuan mereka selanjutnya. Kemudian pada gilirannya, kebutuhan primer inilah yang menjadi sasaran penting dalam politik uang.

Pada dasarnya, masyarakat ekonomi rendah menginginkan sembako murah, upah kerja layak, banyak ketersediaan lapangan pekerjaan, biaya pendidikan rendah biaya kesehatan murah, ketersediaan dana usaha kecil. Politik uang dalam prakteknya lebih banyak menysasar ke masyarakat ekonomi rendah, karena politik



uang mampu melihat langsung pada apa yang menjadi prioritas sekaligus permasalahan yang sering dihadapi oleh rakyat miskin.

Politik uang atau money politics sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Selain itu akan menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, money politics juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri, Politik uang sangat berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang bersih karena perannya sangat merusak.

- a. Politik Uang Merendahkan Rakyat. Para calon atau partai tertentu yang menggunakan politik uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam pemilu telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat rakyat dinilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama 5 tahun.
- b. Politik Uang Merupakan Jebakan Buat Rakyat. Seseorang yang menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk sama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diarahkan untuk hanya memenangkan sang calon semata, setelah calon terpilih maka tidak akan ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengembalikan semua kerugiannya.
- c. Politik Uang Akan Berujung Pada Korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran legislatif dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal, poin ini adalah kaitan dengan point kedua diatas, dimana motifasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang telah terjadi saat kampanye dimana sang calon telah melakukan politik uang
- d. Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat. Transformasi atau perubahan sebuah masyarakat ke arah yang lebih baik akan terhambat, bahkan mati jika proses demokrasi didominasi dengan politik uang. Perubahan yang diimpikan jelas tidak akan tercapai karena sang calon, ketika menang, akan menghabiskan seluruh energinya untuk mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual-beli suara dalam kerangka politik uang.

Money politik bukanlah merupakan barang baru bagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia karena sejak awal mula pemilihan secara langsung praktek-praktek seperti ini sudah berlangsung sehingga ini tentunya harus diwaspadai bersama. Waspada dalam arti untuk tidak ikut serta dalam praktek-praktek yang jelas-jelas merugikan proses demokrasi bangsa ini. Dari sinilah muncul berbagai macam



konflik yang berkepanjangan yang notabene nya sangat mengganggu stabilitas nasional.

Dengan demikian berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh money politik ini diantaranya adalah situasi dan iklim politik menjadi tidak stabil, menghilangkan kesempatan munculnya pimpinan daerah yang berkualitas. Money politik mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum dan merusak demokrasi dan merugikan masyarakat

Materi Keempat: Generasi Milenial

Generasi merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi karena adanya perbedaan usia atau tahun kelahiran dari sekelompok individu dengan kelompok lainnya. Menurut (Mannheim, 1952; Pilcher, 2017) generasi terjadi akibat fenomena sosial yang memiliki beberapa kesamaan, seperti umur, pola pengalaman, dan pola pemikiran. Tambahan pula, individu akan digolongkan menjadi generasi sama jika memiliki persamaan di tahun kelahiran dengan kurun waktu 20 tahun (Mannheim, 1952; Pilcher, 2017). Untuk itu, (Strauss & Howe, 2000) membuat teori perbedaan generasi berdasarkan pada persamaan kurun waktu tahun lahir yang meliputi generasi lost, generasi government issue, generasi silent, generasi boom, generasi X, dan generasi milenial.

Indonesia termasuk ke dalam negara yang mempunyai angka pertumbuhan penduduk yang besar karena angka tersebut naik setiap tahunnya. Misalnya, di tahun 2017 penduduk Indonesia sebanyak 264 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 267 juta jiwa. Setelah itu, pada tahun 2019 jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai sekitar 271 juta jiwa (Worldometers, 2019). Sebanyak 31% dari jumlah penduduk di Indonesia yang merupakan generasi milenial (Worldometers, 2019). Angka ini menunjukkan bahwa generasi milenial mendominasi jumlah penduduk di Indonesia

Generasi milenial menganggap bahwa teknologi merupakan gaya hidup yang tidak dapat terpisahkan. Akibatnya, mayoritas generasi menggunakan teknologi untuk mempermudah kehidupannya seperti mencari-cari informasi melalui internet. Generasi milenial akan lebih tertarik dengan informasi yang didapatkan melalui internet atau media sosial dibandingkan koran atau majalah. Akan tetapi, teknologi juga mengakibatkan generasi milenial memiliki gaya hidup yang konsumtif. Sehingga, generasi milenial sangat senang melakukan transaksi online dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari perbedaan karakteristik setiap generasi. Karakteristik dapat berupa sifat, cara pandang, dan pola pikir yang berbeda dalam kehidupannya untuk menjalankan suatu aktivitas. (Hidayatullah, et al., 2018) Karakteristik yang dimiliki generasi milenial adalah:



- a. Generasi milenial lebih yakin pada user generated content (UGC) dibandingkan informasi searah. User Generated Content (UGC) merupakan konten atau informasi yang dibuat oleh pengguna dan dipublikasikan secara umum dan terbuka, seperti review.
- b. Generasi milenial lebih sering menggunakan telepon genggam dibandingkan televisi. Sehingga, hampir semua generasi milenial memiliki sosial media.
- c. Generasi milenial kurang tertarik untuk membaca dengan cara konvensional, seperti koran, buku, dan majalah.
- d. Generasi milenial sangat memanfaatkan teknologi sebagai informasi yang terpercaya.
- e. Generasi milenial suka menggunakan transaksi cashless.
- f. Generasi milenial memiliki sifat lebih malas dan konsumtif.

Namun, menurut (Wahana, 2015) ada beberapa karakteristik dan nilai-nilai budaya generasi milenial yang berbeda dengan generasi lainnya, yaitu:

- a. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi merupakan gaya hidup generasi milenial.
- b. Dalam menghadapi kehidupan, generasi milenial selalu optimis, percaya diri, dan yakin terhadap diri sendiri. Selain itu, generasi milenial juga suka dengan hal yang serba instan dan tidak menimbulkan kerumitan.
- c. Generasi milenial lebih suka menggunakan gadget atau ponselnya sebagai alat komunikasi.
- d. Saat mencari-cari informasi melalui internet, generasi milenial lebih senang dengan bentuk visual atau gambar.

Tambahan pula, (Putri A. A., 2018) menyatakan bahwa kehidupan generasi milenial berbeda dengan generasi sebelumnya, contohnya:

- a. Generasi milenial sangat menyukai teknologi, seperti internet.
- b. Kehidupan generasi milenial cukup hedonisme.
- c. Dalam penerimaan dan penangkapan informasi, generasi milenial lebih cepat dibandingkan dengan generasi lainnya.
- d. Generasi milenial menyukai tantangan, optimis, memiliki pemikiran kritis, mempunyai keingintahuan yang tinggi, dan menilai pengalaman pribadi adalah sesuatu yang berharga.
- e. Cara hidup generasi milenial sangat multitasking.
- f. Menjadikan teknologi sebagai gaya hidup generasi milenial, salah satu contohnya dalam belanja online



Materi Kelima: Partisipasi Generasi Milineal (Muda) dalam Pemilihan Umum

Generasi Milenial merupakan biasa disebut dengan Generasi Y atau Generasi Langgas adalah kelompok demografi setelah generasi X (Gen-X), generasi ini merupakan generasi Milenial yang terlahir antara tahun 1980-an sampai 2000. Selain itu Generasi milenial juga termasuk kedalam kaum Milenial yang berumur mulai dari 17 sampai 37 pada tahun ini (Nindyati, 2017).

Generasi ini berkembang dengan cepat, banyak hal positive dan negative pada proses perkembangan generasi ini, dimana kemajuan teknologi membuat genarasi milineal cepat menyerap informasi yang ada pada setiap lini masa, sayangnya kecepatan itu membuat bias informasi yang mereka dapatkan, pada pemilu 2019 banyak sekali berita-berita hoax yang bertebaran di media masa menyebabkan miss informasi yang generasi milenial dapatkan.

Selain itu komunikasi online seperti whatsapp, line dan Instagram merupakan salah satu sumber informasi yang meraka gunakan dalam menentukan calon pemimpin nantinya. Berbicara tentang politik tidak akan terlepas dari ke generasi millennial (Tarsidi et al., 2019). Menurut Potehadi (2019) dalam tulisannya di Kompasiana.com, Pada tahun 2019 menjadi sebuah momentum politik yang sangat membutuhkan peran dari generasi milenial yang cakap dalam media, tanggap, kreatif, dan advokatif. Selain itu Generasi Milenial sebagai generasi penerus bangsa, sangat amat diperlukan di bidang politik, apabila pasrtisipasi mereka sangat rendah, siapa yang akan meneruskan perpolitikan dalam suatu Negara? Penelitian yang dilakukan oleh Christiany Juditha dan Josep Darmawan yang berjudul “Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial” menunjukkan penggunaan media yang sering kali digunakan untuk mengakses informasi umum ataupun berita politik oleh generasi milenial yaitu media online dengan 80,5% 100% responden. Untuk itu, agar meraih pasrtisipasi generasi milenial pada bidang politik perlu mengikuti teknologi yang instant dan maju. Dalam penelitian selanjutnya, Partisipasi Politik pada Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden 2019 mendatang menunjukkan Mayoritas responden milenial (91,1%) mengaku akan memberikan suara mereka (Juditha & Darmawan, 2018). Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih milenial sudah mencapai 70 juta – 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih, yang artinya 35% – 40% pemilih milenial sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nanti nya berpengaruh kepada kemajuan bangsa.

Generasi milenial tidak apatis terhadap politik. Memiliki Rasa tanggung jawab dalam dirinya sebagai warga negara yang baik menjadi dasar generasi milenial melakukan partisipasi politik (Laksmitha & Susanto, 2019). Partisipasi mereka dalam bidang politik terutama dalam demokrasi atau pemilihan umum Namun,



untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam bidang politik, diperlukan cara yang berbeda untuk mengikuti zamannya, yaitu seperti pemakaian media sosial agar milenial dapat berinteraksi dan berkomunikasi membahas situasi terbaru secara nyaman tanpa harus memperlihatkan kepribadian mereka secara terbuka.

Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilihan umum Tahun di Indonesia Generasi milenial sangat diperhitungkan partisipasinya di pemilu 2019, dikarenakan generasi milenial adalah bagian dari penentu keberhasilan pemilu 2019. Jumlah pemilih milenial mencapai 35-40 persen sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan pemimpin di masa depan. Dalam hal ini partisipasi politik generasi milenial sangat substansial karena dalam presentase jumlah pemilih generasi milenial banyak menyumbangkan suara di pemilu 2019 (Juditha & Darmawan, 2018). Generasi milenial memiliki pengaruh tersendiri dalam pemilu selain karena jumlahnya yang cukup banyak, generasi milenial juga hidup pada era informasi dimana segala sesuatunya menggunakan internet atau media online. Selain itu, dalam hal perubahan dalam dunia politik membutuhkan orang yang lebih Milenial yang mengerti semua kalangan sehingga dapat menembus tirani yang telah terbangun oleh kepentingan oknum politik yang terlebih dahulu menguasai aktivitas politik. Generasi milenial lah yang mampu membangun dan merubah hal tersebut.

Dengan kekuatan yang cukup tinggi bukan tidak mungkin generasi milenial akan menjadi target utama marketing dari setiap tim sukses pasangan calon, kurangnya informasi yang benar dan masih maraknya berita hoax pada setiap lini media masa, membuat kebingungan sendiri pada setiap pemilih milenial (Septiadi et al., 2020), hal ini membuat banyak spekulasi – spekulasi tersendiri sehingga membuat turunnya motivasi seorang generasi milenial yang mempunyai hak pilih, karena mereka masih ragu akan setiap calon yang di ajukan. Selain itu pola komunikasi yang berbeda-beda di setiap daerah menjadi masalah tersendiri bagi tim sukses mempelajari pola komunikasi adat setiap daerah dimana masyarakat biasanya akan lebih menyambut dengan baik apabila yang datang sudah mengenal terlebih dahulu adat dan budaya di daerah target kampanye (Wibowo, 2019).

Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030 dimana dimasa itu generasi milenial mempunyai peran penting dalam keputusan hak pilih, dimana sekarang pada pemilihan umum yang telah lalu sudah jabarkan dengan jelas berdasarkan sumber dari Lembaga survey dan penguatan kembali oleh lipi dimana mereka menyatakan bahwa 40% merupakan pemilih milenial (Abdi, 2018). Partisipasi milenial akan kembali menghangatkan pesta demokrasi selanjutnya, dimana tim sukses yang dapat menarik perhatian generasi milenial akan memiliki kesempatan lebih besar dalam memenangi proses pesta demokrasi



Materi Keenam: Pendidikan Politik Bagi Generasi Milineal (Muda)

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan politik mengacu pada dasar hukum konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian seluruh materi pendidikan politik harus mengacu pada amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terkecuali pada pelaksanaan bagi pendidikan politik generasi muda. Di Indonesia materi serta kurikulum bagi proses pendidikan politik generasi muda diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik antara lain:

- a. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara
- b. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama
- c. Motivasi berprestasi
- d. Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia
- e. Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik
- f. Disiplin pribadi, sosial, dan nasional
- g. Kepercayaan pada pemerintah
- h. Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

Menurut Colin Mac Andrews dan Mochtar Mas'ood (1978:35-37), sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga. Beberapa diantaranya, seperti pelajaran kewarganegaraan disekolah-sekolah, dengan sengaja dirancang demi tujuan sosialisasi politik, disamping juga untuk tujuan lain. Lainnya seperti kelompok bergaul dan bekerja, hanya cenderung untuk mempengaruhi sosialisasi secara tidak langsung.

a. Keluarga.

Pengaruh keluarga baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang-sangat kuat dan kekal. yang paling jelas pengaruh dari keluarga ini adalah dalam pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan (authority). keluarga biasanya membuat keputusan bersama, dan bagi si anak keputusan yang dibuat itu bisa otoritatif, dalam arti keengganan untuk mematuhiya dapat mengundang hukuman. pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan luas; dengan membentuk ikatan-ikatan



ethnis, linguistik, religius, dan kelas sosialnya; dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan pendidikannya; dan dengan mengarahkan aspirasi-aspirasi pekerjaan dan ekonomisnya.

b. Sekolah

Orang yang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik, dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya.

Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberi pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan "saluran pewarisan" nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat. Sekolah dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap "aturan permainan politik" (rule of the political game) yang tak tertulis, seperti sekolah-sekolah negeri di Inggris yang secara tradisional menanamkan nilai-nilai kewajiban warga negara, hubungan politik informal, dan integritas politik. Sekolah dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dan memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap sistem itu, seperti bendera nasional, dan ikrar kesetiaan "Padamu Negeri" pengajaran sejarah nasional juga berfungsi memperkuat kesetiaan kepada sistem politik.

c. Kelompok pergaulan.

Meskipun sekolah dan keluarga merupakan sarana yang paling langsung terlibat dalam proses sosialisasi, ada juga beberapa unit sosial lain yang bisa membentuk sikap-sikap politik seseorang. Salah satunya adalah kelompok pergaulan, termasuk kelompok bermain dimasa kanak-kanak, kelompok persahabatan, dan kelompok kerja yang kecil, dimana setiap anggota mempunyai kedudukan yang relatif sama dan saling memiliki ikatan-ikatan yang erat. Setiap individu dalam kelompok itu menyesuaikan pendapatnya dengan teman temannya mungkin karena ia menyukai atau menghormati mereka, atau mungkin pula karena ia ingin sama dengan mereka. Jadi kelompok pergaulan itu mensosialisasikan anggota-anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok itu. Seseorang mungkin menjadi tertarik pada politik, atau mulai mengikuti peristiwa-peristiwa politik karena teman-temannya berbuat begitu. Seseorang anak lulusan sekolah menengah mungkin memilih masuk ke suatu perguruan tinggi karena pelajar-pelajar lain temannya berbuat serupa. Dalam hal-hal ini individu tersebut merubah kepentingan dan tingkah lakunya agar sesuai dengan kelompoknya sebagai usaha agar ia tetap diterima oleh anggota-anggota kelompok itu.



d. Pekerjaan.

Pekerjaan dan organisasi-organisasi formil maupun non formil yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu, seperti serikat buruh, klub sosial, dan yang yang semacam itu juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas. Individu-individu mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok tertentu, seperti serikat buruh, dan menggunakan kelompok itu sebagai “penyuluh” (reference) dalam kehidupan politik. Mereka menjadi sensitif terhadap norma-norma kelompok itu dan menilai tindakan-tindakannya berdasarkan apa yang paling baik bagi kelompok itu.

Berpartisipasi dalam dalam suatu tawar menawar kolektif atau dalam suatu demonstrasi dapat merupakan pengalaman sosialisasi yang berkesan mendalam baik bagi pihak buruh maupun pihak majikan. Buruh yang berdemonstrasi dapat mengetahui bahwa ia dapat mempengaruhi bentuk keputusan yang akan mempengaruhi masa depannya yang sedang dibuat, disamping ia juga dapat memperoleh pengetahuan tentang kecakapan-kecakapan bertindak tertentu, seperti berdemonstrasi dan mogok, yang bisa berguna kalau ia berpartisipasi lagi dalam bentuk-bentuk kegiatan politik lain.

e. Media massa.

Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat, dan secara umum seragam. Informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dimana saja di dunia segera menjadi pengetahuan umum dalam beberapa jam saja. Sebagian besar masyarakat dunia terutama bagian-bagiannya yang modern telah menjadi satu kelompok penonton yang tunggal, yang tergerak hatinya oleh peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera yang sama. Kita tahu bahwa media massa surat kabar, radio, televisi, majalah memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa baru merdeka.

Disamping memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa politik, media massa juga menyampaikan, langsung maupun tidak, nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakatnya. Beberapa simbol tertentu disampaikan dalam suatu konteks emosional, dan peristiwa-peristiwa yang di gambarkan disekitar simbol itu menjadi warna yang emosional. Karena itu, sistem media massa yang terkendali merupakan sarana kuat dalam membentuk keyakinan-keyakinan politik.

f. Kontak politik langsung.

Tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga, atau sekolah, tetapi bila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa masuk wajib militer, pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis-krisis politik luar negeri dan perang, dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan individu



dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi hukum.

Menurut Colin Mc Andrews dan Mochtar Mas'oeed (1978:42-43) partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non Konvensional. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

1. Partisipasi politik secara Konvensional adalah Pemberian suara(voting), Diskusi politik, Kegiatan kampanye, Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, Komunikasi individu dengan pejabat politik dan administrasi.
2. Partipasi Politik secara non Konvensional adalah Pengajuan petisi Demonstrasi, Konfrontasi mogok, Tindakan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, perang gerilya dan revolusi

Menurut pendapat mereka bentuk partisipasi politik “Konvensional” adalah bentuk partisipasi yang “Normal” dalam demokrasi modern. Sedangkan bentuk partisipasi politik “Non Konvensional” termasuk beberapa yang mungkin legal seperti petisi maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran utama dari Pengabdian yang telah dilaksanakan yaitu :

4.1. Kesimpulan

- a. Pengabdian ini dapat merubah pola pikir dan menambah pengetahuan bagi generasi muda berkaitan dengan tingkat partisipasi politik bagi Generasi Muda meningkat dan berkurangnya keterlibatan money Politic,
- b. Merumuskan Kabupaten Maros sebagai daerah percontohan dalam partisipasi politik yang tinggi bagi generasi muda,
- c. Mendukung pelaksanaan tugas bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Maros

4.2. Saran

Saran untuk pengabdian yang telah dilaksanakan, sebaiknya pemerintah dalam hal ini KPU atau BAWASLU dapat membentuk sebuah komunitas yang dapat memberikan pengaruh positif terkait pentingnya pemahaman politik

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pada pengabdian ini :

- a. Universitas Hasanuddin selaku pemebri dana pengabdian
- b. LPPM Universitas Hasanuddin sebagai pendukung administrasi pengabdian maupun administrasi keuangan



- c. Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini BAWASLU yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan pengabdian
- d. Para tim pengabdian yang telah membantu dalam proses pengabdian dan penyusunan laporan pengabdian
- e. Para mahasiswa yang telah membantu proses pengabdian

6. Daftar Pustaka

- M. S. (2015). Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Politico*, 4(1).
- Setyawan, D., & Adiwidjaja, I. (2013). Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik Dan Menolak Money